

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari pembahasan yang telah dijelaskan dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo adalah dengan melakukan metode pengawasan oleh masyarakat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan serta pasca pelaksanaan yaitu dalam tahap perencanaan ini akuntabilitas sosial bekerja dengan mengembangkan prinsip relevansi yaitu dengan adanya forum-forum perembukan desa seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa. Forum ini diselenggarakan pemerintah BPD dengan membuka ruang bagi warga guna menelaah kegiatan yang telah diselenggarakan pemerintah desa termasuk hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo adalah masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD dimana BPD merupakan tempat masyarakat memberikan pendapat atau aspirasinya terhadap pemerintahan desa, selain itu juga yang menjadi penghambat juga terjadinya pola komunikasi yang tidak berjalan dengan semestinya hal ini biasanya terjadi karena kurangnya waktu untuk saling berkumpul dan komunikasi terjalin sangat tidak

efektif serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat atau kritiknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa karena faktor ketidaktahuan serta lemahnya pendidikan.

B. Saran

1. Pemerintah desa Wonotopo Kabupaten Purworejo selaku pengambil keputusan harus mampu dan memberikan ruang kepada masyarakat serta merangkul masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mencegah dan menghindari dari kesalahan dan tindakan penyelewengan. Pemerintah Desa sebaiknya mengadakan pertemuan dengan mengundang masyarakat beserta perangkat terutama apabila terjadi permasalahan sehingga dapat memicu masyarakat untuk bersikap kritis dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga dalam melekatkan hubungan pemerintah desa dan masyarakat, pemerintah dapat membuat kotak saran atau kotak aduan apabila ada keluhan yang mungkin masyarakat sungkan untuk mengatakannya secara langsung hal ini dapat memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat. Masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan sehingga masyarakat tidak merasa adanya penyimpangan dalam berjalannya Pemerintahan Desa.
2. Seharusnya Pemerintah dan BPD bekerja sama memberikan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti apa yang

dimaksud BPD dan agar masyarakat juga tahu bahwa BPD merupakan tempat pengawasan berjalannya Pemerintahan Desa dan juga tempat menampung aspirasi masyarakat dalam menyampaikan kritik saran dan sebagainya. Penambahan sarana dan prasarana seperti gedung serta sarana untuk mobilitas para aparatur pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat secara menyeluruh dengan waktu yang singkat. Selain itu, juga perlu penambahan dana dari pemerintah untuk kegiatan pengawasan, karena pengawasan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat